

L A M P I R A N
SAMBUTAN KETUA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2012
Tanggal 16 April 2012

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

1. Deregulasi dan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana di kantong-kantong kemiskinan yang kebanyakan besar terdapat di sektor Pertanian, Nelayan, Petani Tebu dan Petani Garam;
2. Optimalisasi Asset Provinsi Jawa Timur mulai dari Penataan, Penertiban dan Pemanfaatannya;
3. Mengoptimalkan fungsi BUMD Provinsi Jawa Timur sebagai suport bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
4. Peningkatan sarana promosi Investasi dan pemetaan kawasan Investasi sesuai muatan lokal;
5. Peningkatan mutu dan kualitas pelayanan dasar Pendidikan dengan program wajib belajar 12 tahun dan Pelayanan Kesehatan;
6. Aktualisasi Badan Latihan Kerja (BLK) sebagai upaya mengurangi kemiskinan;
7. Program Peningkatan status jalan Kab/Kota menjadi jalan Provinsi;
8. Pembangunan sarana prasarana jalur transportasi antar kepulauan;
9. Revitalisasi Pembangunan Kali Lamong sebagai upaya penanggulangan Banjir;
10. Penyelesaian Pembangunan Tanggul di sepanjang sungai Bengawan Solo;
11. Pembangunan Bendung Gerak Sembayat (New Sembayat Barrage) masuk dalam Blue Book Bappenas;
12. Revitalisasi industri tebu, pemanfaatan stillage dengan menjalin kerjasama pihak luar;

I. Perihal Revitalisasi Pabrik Gula dan Produktivitas Tanaman Tebu di Jawa Timur disampaikan hal sbb.:

- a) Pandangan umum dari pelaku industri gula khususnya Jawa Timur terkait dengan produksi dan kaitan antara pabrik gula dan kepentingan petani serta dukungan dan kebijakan pemerintah terhadap petani tebu.
- b) Melakukan pembelajaran tentang tata cara penanaman tebu dan metode panen dan pemanfaatan *stillage* sebagai pupuk.
- c) Melakukan dan pengembangan pusat riset tebu dan mempelajari perkembangan riset dan teknologi pertanian tebu.
- d) Tata kelola hubungan perusahaan dan petani dalam penetapan jaminan harga produksi tebu petani didasarkan atas “rendeman” yang sifatnya sangat transparan dan setiap petani ditentukan zona pabrik pengolahan tebunya. Penetapan hasil panen masing-masing petani diuji dengan metode “*core sample*” sebelum diolah di mesin penggilingan tebu dan hasilnya dapat dilihat secara *on-line* oleh masing-masing petani yang dapat dimonitor oleh petani 24 jam/hari.
- e) Konsistensi kebijakan pemerintah sangat mendukung stabilitas produksi gula nasional. Produk gula harus tetap berjalan normal meskipun pada saat yang bersamaan terjadi fluktuasi /kenaikan harga gula yang secara ekonomis lebih menguntungkan daripada mengimport gula.
- f) Deregulasi sektor pertanian tebu utamanya kebijakan penetapan harga yang pada intinya ditujukan untuk memecahkan berbagai masalah terkait resiko yang timbul antara produsen gula dengan petani tebu. Fungsi utamanya adalah penetapan secara proporsional penghasilan petani tebu dan produsen gula. Rata-rata produksi gula dihitung berdasarkan 60% total produksi gula dan petani akan menerima rata-rata 60% dari penghasilan agroindustri. Harga tebu petani tergantung level kandungan *sucrose* yang dikandung dalam tebu petani (kualifikasi

kandungan gula petani dalam tebu ditetapkan berdasarkan model *Total Recoverable Sugar* (TSR).

- g) Masa depan untuk mengatasi krisis BBM sebagai alternatif dan prospek energi berbasis ethanol sangat menjanjikan yang didukung oleh adanya temuan produk baru yang berkembang a.l. dari gula, *ethanol, electricity, ethylçene* dan *hydro-carbon*. Disamping itu terdapat perkembangan baru dalam penggunaan ethanol untuk kebutuhan kendaraan bermotor, bio-plastik dan bio-hydroc karbon (minyak diesel berbahan baku tebu dan diesel). Hal ini mendorong perlunya perbaikan struktur ekspansi produksi, peningkatan produktifitas, fokus dan membangun kerjasama internasional, serta pembangunan pabrik ethanol yang berdedikasi. Tantangan yang akan dihadapi adalah perlunya konsolidasi terhadap kebutuhan terkait ethanol di pasar internasional mengingat ethanol merupakan energi emisi rendah serta kaitannya dengan peningkatan ketahanan energi. Disamping itu ethanol dapat dikembangkan di negara-negara berkembang dan terbuka kerjasama dalam bidang tanggung jawab global, keadilan sosial dan efisiensi ekonomi.
- h) Untuk target capaian kapasitas pabrik, perlu adanya revitalisasi Pabrik Gula yang sudah tua untuk di perbarui dengan menggunakan mesin-mesin generasi terbaru. Kemajuan industri gula sangat ditentukan oleh keterkaitan yang erat antara *supply and demand* termasuk kaitan antara pasokan bahan baku gula dengan kebutuhan industri dan tata niaga domestik maupun nasional.
- i) Guna menjaga stabilitas produksi yang erat kaitannya dengan keamanan pengadaan pasokan, maka industri gula sangat *concern* dengan perlunya peremajaan mesin-mesin pengolahan serta penerapan teknologi terkait dengan peremajaan tanaman dan penemuan bibit - bibit unggul tanaman tebu untuk meningkatkan produktifitas.
- j) Kebijakan pengembangan sektor industri gula dan ethanol nasional di Indonesia pada hakekatnya telah dilandasi dengan serangkaian

instrumen hukum yang cukup baik a.l. Perpres No. 5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional; Inpres No. 1/2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan BBN sebagai Bahan Baku Alternatif; SK Dirjen Migas No. 3674/24/DJM/2006; PP No. 08/2007 tentang pembentukan *Green Energy Fund*; Permen ESDM tahun 2009 tentang Mandatory Bahan Bakar Nabati; dll;

- k) Guna mengamankan berbagai kebijakan Pemerintah dalam rangka pembangunan industri gula dan energi terbarukan yang konkrit a.l. pembangunan perkebunan tebu guna mendukung energi terbarukan berbasis ethanol nasional kiranya instansi pemerintah terkait dan para pemangku kepentingan dapat segera mengkaji berbagai permasalahan dan potensi hambatan yang terdapat dalam upaya mencapai peningkatan produktifitas industri gula nasional. Hal ini dipandang perlu untuk mengetahui penyebab kelambatan dalam proses pembangunan industri ethanol nasional berbasis tebu, utamanya keterkaitan peningkatan volume produksi gula, ethanol dan industri otomotif turunannya yang terkait satu dengan yang lainnya.

II. Penanganan Masalah Aset Daerah :

- a) Penataan Aset daerah melalui kejelasan alas hak terhadap aset yang secara fisik dikuasai tetapi dokumen tidak dikuasai, fisik tidak dikuasai tetapi dokumen dikuasai, maupun terhadap aset yang secara fisik dan dokumen tidak dikuasai.
- b) Penertiban terhadap Aset yang dipakai oleh pihak ketiga tanpa adanya perikatan yang jelas.
- c) Optimalisasi Aset dalam rangka pengelolaan / pemanfaatannya untuk peningkatan PAD, utamanya terhadap aset-aset yang idle.
- d) Pemilahn terhadap terhadap Aset yang murni untuk mendukung Tupoksi SKPD dengan aset-aset yang idle.

III. Bidang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) :

- a) Pembutan Blue Print setiap BUMD.

- b) Penataan terhadap BUMD sesuai dengan core bisnis pada proses awal didirikan.
- c) Menjadikan BUMD sebagai respon pendorong bagi program-program Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- d) Memperkuat posisi BUMD seperti PT. BPR Jatim dalam peningkatan perekonomian rakyat (pro rakyat).
- e) Memacu kinerja dan memaksimalkan hasil / keuntungan usaha untuk peningkatan PAD.

IV. Bidang Pendapatan Daerah :

- a) Kebijakan dalam optimalisasi pendapatan dengan mempermudah pelayanan.
- b) Melakukan upaya peningkatan pendapatan di luar pajak daerah melalui peningkatan penerimaan Dana Perimbangan, Sumbangan Pihak Ketiga, dan CSR Perusahaan.

V. Bidang Investasi :

- a) Pemetaan kawasan investasi sesuai dengan keunggulan masing-masing daerah.
- b) Peningkatan sarana promosi investasi.

VI. Masalah Pendidikan

- a) Wajib belajar 12 Tahun sangat terganggu dengan adanya ketentuan bahwa pendaftaran sekolah harus melampirkan Akte Kelahiran karena:
 - Pengurusan Akte Kelahiran di desa masih sangat sulit dan biaya mahal.
 - Persyaratan Rumit, sampai ke pengadilan atau ibukota Kabupaten sehingga banyak anak usia sekolah yang tidak mengurus dan tidak sekolah.
- b) Pencairan dana tunjangan profesi pendidikan diterima oleh yang berhak tidak setiap bulan akan tetapi tiap 6 (bulan) termasuk BOS,

BOSDA, dan BOS MADIN sehingga perlu langkah-langkah Pemprov untuk memfasilitasi tertib administrasinya

- c) Sekolah Berwawasan Lingkungan (Adiwiyata), Bantuan Guru Honorer, Revitalisasi TK, Pemberantasan Buta Aksara, Bantuan Madrasah Diniyah (MADIN), USB SMK dan Revitalisasi Pendidikan Kepramukaan

VII. Masalah Kesehatan

- a) Pelayanan Kesehatan terhadap santri yang hidup dipesantren yang jauh dari orang tuanya dan tidak memiliki identitas diri (KTP) dan tidak terdaftar didesa, sangat mengalami kesulitan ketika yang bersangkutan sakit untuk mendapatkan fasilitas jamkesmas maupun jamkesda karena kepala desa tidak mau memberikan surat keterangan sehingga diperlukan adanya trobosan kebijakan dari Pemprov untuk disinkronkan dengan kabupaten/kota.
- b) Untuk menghindari adanya diskriminasi pelayanan kesehatan di rumah sakit – rumah sakit milik Provinsi antara masyarakat yang membayar dengan masyarakat miskin maka seyogjanya semua fasilitas pelayanannya agar berstandart misalnya ber AC.
- c) Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada RS dan Puskesmas
- d) Penambahan dan Penggantian Alat-alat Kesehatan
- e) Pembangunan gedung ruang pasien Klas III

VIII. Masalah Infrastruktur Pedesaan dan jalan – jalan provinsi

- a) Masih sangat banyaknya kerusakan jalan antar Desa maupun poros Desa seyogjanya dapat disikapi oleh pemerintah propinsi utamanya terhadap realisasi bantuan keuangan untuk peningkatan Infrastruktur di masing2 Kabupaten/Kota setiap tahun sebesar 5 Milyar dalam pelaksanaannya agar dilengkapi dengan rencana perbaikan jalan Desa minimal antara di 4 atau 5 kecamatan, sehingga bantuan keuangan Provinsi dapat mewarnai perbaikan jalan pedesaan di 38 Kabupaten/kota di Jawa Timur.

- b) Pemeliharaan jalan provinsi yang menghubungkan antara kota kab/kota di seluruh Jawa Timur perlu ditingkatkan anggaran maupun kualitas pemeliharannya karena :
- Kerusakan² yang terjadi umumnya karena badan jalan yang lebih tinggi dari jalan
 - Tidak ada saluran air
 - Pelaksanaan pemeliharaan tambal sulam yang asal²an karena kurangnya pengawasan dari Upt Dinas Bina Marga sehingga perbaikan yang dilakukan hanya berumur harian karena warles pengerasan yang dipergunakan bobotnya sangat kecil sehingga hasilnya tidak berkualitas dan mudah mengelupas, keadaan ini utamanya di wilayah Madura.
- c). Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
- d). Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana
- e). Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana

IX. Masalah Kemiskinan dan Sosial

- a) Bantuan Pemerintah Provinsi yang berupa ternak, alat pembuatan pupuk kandang dan bibit agar diteruskan.
- b) Bantuan penyediaan air bersih dipedesaan melalui pengeboran sumber, waduk dan lain sebagainya perlu terus diprioritaskan terutama pada wilayah² kekurangan air dengan meningkatkan program – program :
- Pengeboran air bawah tanah
 - Perbaikan sarana / fasilitas sumber – sumber air bersih dipedesaan sehingga minimal dapat memenuhi standart kesehatan misalnya terpisahnya antara MCK dengan tempat mandi penduduk
 - Penyulingan air laut menjadi air tawar perlu terus dikembangkan utamanya pada daerah – daerah pesisir utamanya penghasil garam yang pada umumnya tidak mempunyai sumber² air.
- c). Pemerintah Propinsi sampai sekarang belum menyelesaikan proyek penyulingan air laut menjadi air tawar di pulau Mandangin di

Kabupaten Sampang Madura karena sampai sekarang masih belum berfungsi.

- d) Terpenuhinya perlindungan dan hak-hak penyandang cacat
- e). Pemberdayaan dan Pemulangan WTS
- f). Penanganan Anjal dan peningkatan Panti Sosial

X. Perdagangan

Perlindungan dan keberpihakan Pemerintah Provinsi terhadap petani – petani garam perlu terus ditingkatkan, karena masyarakat petani garam sudah merasakan manfaatnya. Sedangkan perdagangan garam antar provinsi masih banyak didominasi oleh pengusaha – pengusaha kapitalis dengan mempergunakan regulasi pemerintah utamanya kementerian perdagangan yang sangat merugikan petani garam, utamanya di Madura yang setiap tahun mengalami over produksi sampai dengan 500.000 ton.

XI. Lingkungan Hidup

Perlindungan / pengembangan tanaman – tanaman bakau di pesisir Madura, perlu perhatian serius oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota dengan kebijakan yg harus bersifat universal tidak tebang pilih, karena keadaan pada wilayah – wilayah pesisir sepanjang jalan provinsi sudah menjadi wilayah bisnis dan perumahan hal tersebut berawal dari berdirinya gedung2 Pertamina yang terus diikuti oleh masyarakat.

XII. Kelembagaan Pemerintah

Kelembagaan Bakorwil di wilayah Madura benar - benar sangat dibutuhkan karena space of control dengan jarak yang amat jauh pada wilayah2 kepulauan dari perhatian kepala daerah utamanya Gubernur sehingga Bakorwil sebagai kepanjangan tangan Gubernur perlu terus diperkuat kelembagaannya sekaligus juga diberikan Anggaran yang memadai agar secara koordinatif mampu menyerap dan mendengar

serta melihat secara langsung melalui kunjungan2 kewilayah wilayah kepulauan yang cukup terpencil.yang masih belum banyak mendapatkan fasilitas yang memadai utamanya dibidang transportasi dari Pemerintah seperti Perpustakaan Masuk Desa sejumlah 1000 Desa/Kelurahan dan Arsip Masuk Desa sejumlah 1000 Desa/Kelurahan.

XIII. Ketenagakerjaan

- a) Memberikan jaminan kepastian dan hak – hak pekerja utamanya pekerja Outsourcing
- b) Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja
- c) Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
- d) Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja
- e) Aktualisasi BLK
- f) Mobilitas Penduduk
- g) Kependudukan

XIV. Pemberdayaan Perempuan dan KB, Kepemudaan dan Keolahragaan

- a). Peningkatan Pusat pelayanan terpadu (PPT)
- b) Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
- c) Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak
- d) Simulasi KB responsif Gender
- e) Kota Layak Anak
- f) Pencegahan tindak kekerasan pada keluarga dan pembantu rumah tangga
- g) Pencegahan dan penanggulangan trafiking
- h) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan olahraga prestasi, dan olahraga rekreasi
- i) Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
- j) Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- k) Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Jawa Timur
Ketua,**

TTD

H. IMAM SUNARDHI